



Bogor, 02 Agustus 2021

Nomor : 190_IT3.L1.24-TU.01.2021
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan Workshop Nasional I

Yth.

Nama yang terlampir
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Workshop Nasional I yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (*Center for Transdisciplinary and Sustainability Science*) – IPB University dengan dukungan Chatham House, kami bermaksud mengundang Saudara untuk berpartisipasi pada acara tersebut (kerangka acuan dan agenda terlampir).

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
Waktu : 08.30-16.00 WIB
Tempat : Aplikasi Zoom
(*Meeting ID dan Passcode* akan disampaikan setelah konfirmasi)

Kami mengharapkan kesediaan Saudara yang ada dalam daftar undangan untuk dapat berpartisipasi. Konfirmasi kehadiran dapat dilakukan pada tautan berikut: <http://ipb.link/workshop1-ctss> paling lambat hari Minggu, 8 Agustus 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Fitta Setiajiati, S.Hut., M.Si pada +62 813-9071-9997 atau *e-mail* fittajiati@apps.ipb.ac.id.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Kepala PKSKT-IPB University



Damayanti Buchori

Prof. Dr. Damayanti Buchori, M.Sc
NIP: 19601028 198603 2002



Daftar Undangan:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
2. Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, KLHK
3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK
4. Biro Kerjasama Luar Negeri, KLHK
5. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan
6. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian
7. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
8. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas
9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
10. Lembaga Ekolabel Indonesia
11. CCROM – IPB
12. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Prof. Ahmad Maryudi)
13. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur
14. *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)*
15. Yayasan KEHATI
16. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
17. JAVLEC
18. ARUPA
19. FWI
20. CIFOR
21. *The Multistakeholder Forestry Programme Phase 4 (MFP4)*
22. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
23. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO)
24. Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI)
25. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO)
26. Pemegang IUPPHK-HA: PT. Sari Bumi Kusuma; PT. Taliabu Godo Maogena
27. Pemegang IUPPHK-HT: PT. RAPP; APP Sinar Mas; PT. Parwata Rimba
28. Perum Perhutani
29. Kelompok Tani Wono Lestari
30. Forum Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (Forum LVLK)
31. Forum Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
32. Prof. Hariadi Kartodihardjo (IPB)
33. Prof. Sudarsono Soedomo (IPB)
34. Dr. Soeryo Adi Wibowo (IPB)

KERANGKA ACUAN
WORKSHOP NASIONAL
EFEKTIVITAS PERDAGANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK
MENDUKUNG KELESTARIAN HUTAN, PENGGUNAAN LAHAN, DAN MATA
PENCAHARIAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu pemilik tropis terbesar di dunia memiliki 120,60 juta hektar kawasan hutan atau mencakup 64,15% dari total luas daratan (188,00 juta hektar). Kawasan hutan tersebut terdiri dari 85,90 juta hektar yang tertutup oleh hutan dan 34,70 juta hektar tidak tertutup oleh hutan. 35,85% dari luas daratan (atau seluas 67,40 juta hektar) merupakan areal penggunaan lain (APL). APL terdiri dari 8,20 juta hektar yang tertutup oleh hutan dan 59,20 juta hektar tidak tertutup oleh hutan. Lebih dari 50% kawasan hutan memiliki fungsi produksi (P.16/ MENLHK/S/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024). Dengan sumberdaya hutan yang tinggi tersebut, Indonesia menjadi salah satu pengekspor kayu tropis terbesar di dunia dengan beragam produk kayu mulai dari kayu lapis, *pulp*, dan kertas hingga furnitur dan kerajinan tangan. Nilai ekspor produk kayu Indonesia pada tahun 2020 sebesar USD 11,05 Miliar¹. Pada tahun 2003 Indonesia mulai mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dengan pendekatan multifihak. Pada tahun 2007, Indonesia memulai perundingan Perjanjian Kemitraan Sukarela-Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement/ FLEGT-VPA*) dengan Uni Eropa yang kemudian ditanda tangani pada tahun 2013. Pada tahun 2016 Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerima pengakuan Uni Eropa atas lisensi FLEGT. Kayu-kayu ekspor dari Indonesia kemudian dipasarkan ke negara Uni Eropa dengan jaminan legalitas. Di tingkat negara eropa, Indonesia merupakan mitra dagang negara FLEGT-VPA terbesar di Uni Eropa dengan nilai ekspor kayu mencapai EUR 1,1 miliar di tahun 2019.²

Teori perubahan FLEGT didasarkan pada tiga aksi FLEGT, yaitu produksi kayu, permintaan, standar dan dinamika perdagangan kayu global. FLEGT telah diikuti oleh lebih dari 12 negara melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA), termasuk Indonesia.³ Untuk mentransformasikan penerapan FLEGT tersebut maka Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen legalitas yang disebut dengan Sistem Penjaminan Legalitas Kayu Indonesia (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) yang dikembangkan dan dilaksanakan secara multipihak dan diharapkan sebagai reformasi tata kelola yang berfungsi sebagai instrumen untuk salah satunya mengatasi *illegal logging*.

Disamping itu, tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia tergolong tinggi di dunia dan *illegal logging* menjadi salah satu penyebabnya. Data pada buku statistik produksi kehutanan tahun 2018 menunjukkan bahwa hampir sepertiga atau 34,8 juta hektar lahan hutan nasional mengalami deforestasi atau degradasi.⁴ Dari situasi ini, ada sumbangan emisi karbon yang tak terelakkan. Sejak perumusan *Reduction Emission from Deforestation* (RED) di UNFCCC COP-11 Montreal tahun 2005 dan berkembang menjadi *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD+) pada UNFCCC COP-13 tahun 2007 di Bali, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan serta melakukan upaya penambahan stok karbon hutan,

¹ <http://phpl.menlhk.go.id/tabular>

² All about the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement. <https://www.euflegt.efi.int/indonesia>

³ Cerutti PO, Goetghebuer T, Leszczynska N, Dermawan A, Newbery J, Eckebil PPT, Tsanga R. 2021. Voluntary partnership agreements: assessing impacts for better policy decisions. Forest Policy and Economics 124: 1-4. doi: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102386>

⁴ [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Produksi Kehutanan 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

pengelolaan hutan lestari, dan konservasi. Saat ini, REDD+ di Indonesia sudah memasuki tahapan implementasi dengan tantangan dan permasalahan yang beragam.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin – IPB (PKSKT – IPB) bermaksud melakukan pencermatan mendalam terkait dengan efektifitas penerapan lisensi FLEGT-VPA dan instrumen SVLK, dan Implementasi kebijakan terkait REDD+. Apakah FLEGT-VPA dan Instrumen SVLK telah efektif memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola hutan di Indonesia, mewujudkan kelestarian hutan, meningkatkan kelestarian tata guna lahan dan memberikan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat? Dalam rangka pencermatan tersebut PKSKT – IPB melalui dukungan dari Chatham House bermaksud menyelenggarakan Workshop Nasional dengan judul EFEKTIVITAS PERDAGANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK Mendukung Kelestarian Hutan, Penggunaan Lahan dan Mata Pencaharian Masyarakat.

Workshop Nasional ini merupakan seri pertama dari tiga kali Workshop Nasional yang akan diselenggarakan oleh PKSKT-IPB. Pada seri pertama ini, workshop bertujuan untuk memperbaiki dan meninjau proses dan metodologi penelitian (ruang lingkup dan metode), serta mengidentifikasi penelitian yang sudah ada (termasuk kesenjangan dalam pengetahuan dan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut; identifikasi aktor yang tertarik untuk berkontribusi). Pada seri kedua yang rencananya dilaksanakan pada awal tahun 2022, bertujuan untuk menyebarluaskan studi lapangan dan memperoleh masukan dari para ahli (diskusi hasil penelitian). Sementara, seri ketiga yang diselenggarakan pada pertengahan atau akhir tahun 2022 adalah untuk pembahasan draft rekomendasi yang sudah disusun tim.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian penelitian kerjasama PKSKT-IPB dan Chatham House dengan tema *STRENGTHENING FOREST GOVERNANCE: PREPARING FOR THE NEXT 10 YEARS*. Rangkaian penelitian tersebut bertujuan utama untuk mengembangkan ide-ide baru dalam memperkuat efektivitas kerjasama dan perdagangan internasional untuk mendukung transisi menuju tata guna hutan dan lahan, serta mata pencaharian yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat merekomendasikan capaian kepada negara donor dan organisasi multilateral di masa depan dengan melibatkan tiga negara yaitu Indonesia, Kongo, dan Brazil.

B. Tujuan

Workshop Nasional ini diselenggarakan untuk memperoleh gambaran yang akurat dari para pihak terkait dengan empat fokus utama yaitu :

- (1) Efektivitas sertifikasi legalitas kayu (SLK) untuk mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada hutan negara dan hutan rakyat: Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya
- (2) Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) pada PHPL dan produksi lestari, penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada areal konsesi (hutan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya
- (3) Efektivitas REDD+ pada penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya
- (4) Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) dan REDD+ pada perubahan penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya

II. KERANGKA PENDEKATAN WORKSHOP

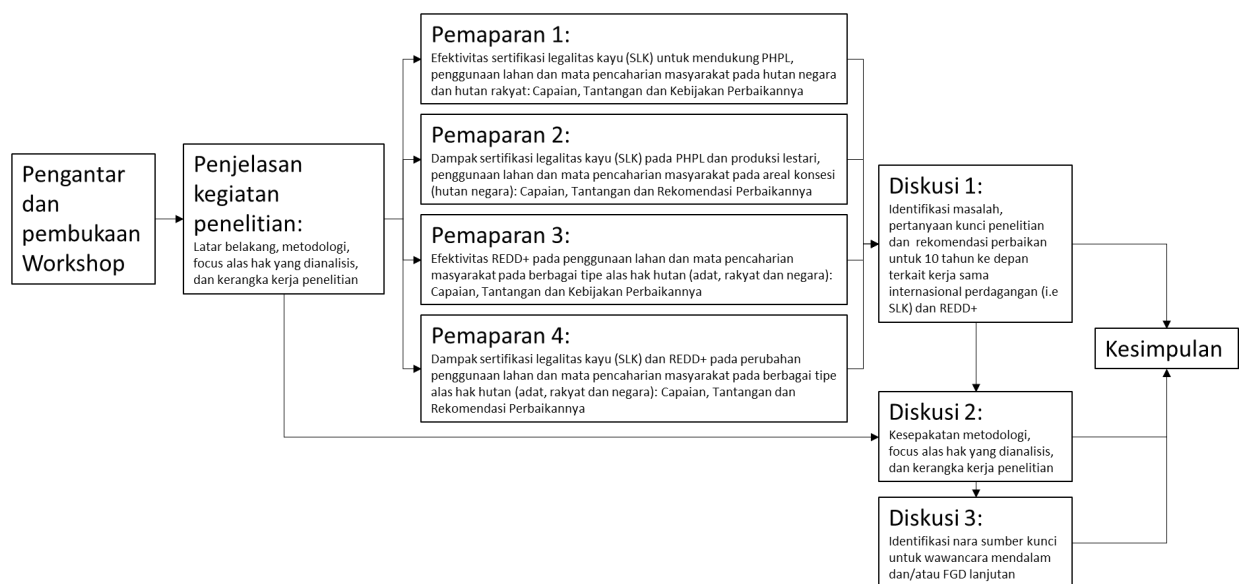
A. Pemaparan dan Diskusi

Dalam acara workshop nasional ini, terdapat empat materi yang akan dipaparkan oleh para pihak. PKSKT – IPB membaginya dalam dua lingkup besar yang saling berkaitan erat antara FLEGT VPA,

SVLK dan REDD+. Rangkaian materi dan diskusi diharapkan dapat mengalir pada harapan jawaban yang hendak ditemukan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sesi pemaparan **materi pertama** adalah tentang *Efektivitas sertifikasi legalitas kayu (SLK) untuk mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada hutan negara dan hutan rakyat: Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya*. Dilanjutkan dengan pemaparan **materi kedua** *Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) pada PHPL dan produksi lestari, penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada areal konsesi (hutan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya*.
- 2) Sesi pemaparan **materi ketiga** *Efektivitas REDD+ pada penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya*. Dilanjutkan dengan sesi pemaparan **materi keempat** *Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) dan REDD+ pada perubahan penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya*

Dari dua lingkup pemaparan materi tersebut, Fasilitator akan memandu diskusi dalam tiga sesi diskusi. Masing-masing diskusi akan berisikan tentang 1) Identifikasi masalah, pertanyaan kunci penelitian dan rekomendasi perbaikan untuk 10 tahun ke depan terkait kerja sama internasional perdagangan (i.e SLK) dan REDD+; 2) Kesepakatan metodologi, fokus alas hak yang dianalisis, 3) Identifikasi narasumber kunci untuk wawancara mendalam dan/atau FGD lanjutan. Kerangka pendekatan Workshop Nasional I adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pendekatan Workshop Nasional I

B. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses pemaparan dan diskusi dilakukan, maka moderator akan merangkum dan memberikan kesimpulan atas hasil masukan dan diskusi. Seluruh informasi dan hasil kesimpulan akan disampaikan kepada para undangan yang hadir di Workshop Nasional ini.

III. AGENDA ACARA

A. Waktu Pelaksanaan

Workshop Nasional ini akan diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 8.30 – 16.05 WIB yang dilakukan secara daring. Link untuk agenda acara ini akan disampaikan di dalam undangan.

B. Narasumber

Workshop Nasional ini akan mengundang narasumber yang telah dipetakan berdasarkan tema paparan, yaitu ;

- (1) **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**, dengan tema *Efektivitas sertifikasi legalitas kayu (SLK) untuk mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada hutan negara dan hutan rakyat: Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya*;
- (2) **Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)**, dengan tema *Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) pada PHPL dan produksi lestari, penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada areal konsesi (hutan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya*;
- (3) **Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**, dengan tema *Efektivitas REDD+ pada penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya*;
- (4) **Rukka Sombolinggi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, dengan tema *Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) dan REDD+ pada perubahan penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya*

C. Undangan

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
2. Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, KLHK
3. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK
4. Biro Kerjasama Luar Negeri, KLHK
5. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan
6. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian
7. Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
8. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas
9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
10. Lembaga Ekolabel Indonesia
11. CCROM – IPB
12. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Prof. Ahmad Maryudi)
13. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur
14. *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)*
15. Yayasan KEHATI
16. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
17. JAVLEC
18. ARUPA
19. FWI
20. CIFOR
21. *The Multistakeholder Forestry Programme Phase 4 (MFP4)*
22. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
23. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO)
24. Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI)
25. Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO)
26. Pemegang IUPPHK-HA: PT. Sari Bumi Kusuma; PT. Taliabu Godo Maogena
27. Pemegang IUPPHK-HT: PT. RAPP; APP Sinar Mas; PT. Parwata Rimba
28. Perum Perhutani

29. Kelompok Tani Wono Lestari
30. Forum Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (Forum LVLK)
31. Forum Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
32. Prof. Hariadi Kartodihardjo (IPB)
33. Prof. Sudarsono Soedomo (IPB)
34. Dr. Soeryo Adi Wibowo (IPB)

D. Agenda Acara

Waktu	Agenda	Keterangan
8.30 – 9.00	Persiapan	PKSKT – IPB / CTSS
9.00 – 9.05	Pengantar dan pembukaan WS	Pembicara: Prof. Dr. Ir. Damayanthi Buchori, M.Sc
9.05 – 9.20	Penjelasan kegiatan penelitian: latar belakang, metodologi, fokus alas hak yang dianalisis, dan kerangka kerja penelitian	Pembicara: Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS
9.20 – 9.45	Pemaparan 1: Efektivitas sertifikasi legalitas kayu (SLK) untuk mendukung PHPL, penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada hutan negara dan hutan rakyat: Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya	Narasumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PIC: Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS
9.45 – 10.10	Pemaparan 2: Efektivitas sertifikasi legalitas kayu (SLK) pada PHPL dan produksi lestari, penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada areal konsesi (hutan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya	Narasumber: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) PIC: Dr. Ir. Rufi'ie, M.Sc
10.10 – 10.35	Pemaparan 3: Dampak REDD+ pada penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Kebijakan Perbaikannya	Narasumber: Direktorat Jenderal Perubahan Iklim PIC: Dr. Ir. Yulius Hero, M.Sc.F.Trop
10.35 – 11.00	Pemaparan 4: Dampak sertifikasi legalitas kayu (SLK) dan REDD+ pada perubahan penggunaan lahan dan mata pencaharian masyarakat pada berbagai tipe alas hak hutan (adat, rakyat dan negara): Capaian, Tantangan dan Rekomendasi Perbaikannya	Narasumber: Rukka Sombolinggi (AMAN) PIC: Prof. Dr. Ir. Damayanthi Buchori, M.Sc
11.00 – 12.00	Diskusi 1: Identifikasi masalah, pertanyaan kunci penelitian dan rekomendasi perbaikan untuk 10 tahun ke depan terkait kerja sama internasional perdagangan (i.e SLK) dan REDD+	Moderator: Ir. Haryanto R Putro, MS PIC: - Fitta Setiajiati, S.Hut, M.Si - Silfi Iriyani, S.Hut, M.Si
12.00 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 14.30	Diskusi 2: Kesepakatan metodologi, focus alas hak yang dianalisis, dan kerangka kerja penelitian	Moderator: Ir. Haryanto R Putro, MS PIC:

Waktu	Agenda	Keterangan
		- Fitta Setiajiati, S.Hut, M.Si - Silfi Iriyani, S.Hut, M.Si
14.30 – 15.30	Diskusi 3: Identifikasi narasumber kunci untuk wawancara mendalam dan/atau FGD lanjutan	Moderator: Ir. Haryanto R Putro, MS PIC: - Fitta Setiajiati, S.Hut, M.Si - Silfi Iriyani, S.Hut, M.Si
15.30 – 16.00	Kesimpulan	Moderator: Ir. Haryanto R Putro, MS
16.00 – 16.05	Penutupan	Prof. Dr. Ir. Damayanthi Buchori, M.Sc

E. Narahubung

Para pihak yang diundang dalam agenda Workshop Nasional ini dapat menghubungi PKSKT – IPB sebagai penyelenggara kegiatan.

Narahubung :

Fitta Setiajiati, S.Hut., M.Si

Hp : +62 813-9071-9997

Email : fittajiati@apps.ipb.ac.id

IV. PENUTUP

Demikian kerangka Acuan ini disampaikan sebagai acuan bersama, semoga apa yang kita harapkan melalui Workshop Nasional yang diselenggarakan oleh PKSKT – IPB bersama dengan Chatham House dapat terselenggara dengan baik dengan hasil-hasil yang memberikan khasanah pengetahuan dan memperkuat strategi terkait FLEGT, SVLK, dan REDD+.